



# LAPORAN KEGIATAN

**PARLIAMENTARY SESSION IN THE CONTEXT OF  
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) PUBLIC FORUM**

**“Strengthen the Multilateral Trading System Through the  
Equitable Governance of Work”**

**Virtual, 29 September 2021**



Mr. Nadir MANZOOR



Mr. Bernd LANGE



Ms. Marie-Pierre VEDRENNE



Dr. Fadli ZON



Ms. Marva CORLEY-COLLIBALY

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN PELAKSANAAN  
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PARLIAMENTARY SESSION IN THE CONTEXT OF  
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) PUBLIC FORUM**

**“Strengthen the Multilateral Trading System  
Through the Equitable Governance of Work”**

**Virtual, 29 September 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Pada tanggal 29 September 2021 dilaksanakan pertemuan virtual Parliamentary Session in the Context of WTO Public Forum yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Assembly (IPU), dengan tema “*Strengthen the Multilateral Trading System through the Equitable Governance of Work*”. Secara substansi pertemuan mendiskusikan mengenai isu hak-hak buruh dalam kerangka Perdagangan Internasional bilateral dan plurilateral di WTO. Isu hak-hak buruh sempat mengemuka di WTO karena adanya perdebatan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang mengenai perlu atau tidaknya ratifikasi terhadap Konvensi International Labour Organization (ILO) dicantumkan sebagai syarat dalam sebuah perjanjian dagang.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan yang tergabung di dalam Uni Eropa memandang bahwa setiap perjanjian dagang perlu mensyaratkan ratifikasi Konvensi ILO sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara berkembang karena perdagangan internasional juga harus memperhatikan hak-hak buruh. Di sisi lain negara-negara berkembang yang masih kesulitan untuk memenuhi kondisi-kondisi yang diwajibkan oleh Konvensi ILO merasa berkeberatan dan melihat bahwa ini hanyalah taktik

dari negara maju untuk menahan laju ekspansi negara-negara berkembang ke pasar negara-negara maju yang sudah dengan susah payah berhasil diperjuangkan melalui rangkaian negosiasi *Uruguay Round*.

Diskusi dimoderatori oleh anggota Parlemen Eropa Hon. Mr. Bernd Lange selaku *Chair of the Committee on International Trade (INTA)*, Parlemen Eropa serta Hon. Mr. Nadir Manzoor dari Parlemen Guyana selaku *Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO*. Diskusi juga dihadiri oleh sejumlah pembicara seperti; Ms. Marva Corley-Coulibaly dari ILO dan juga Yth. Dr. Fadli Zon selaku Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang mewakili DPR-RI.

#### **A. SUSUNAN DELEGASI**

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. Fadli Zon (A-86)	F-Gerindra	Ketua BKSAP

#### **B. VISI DAN MISI DELEGASI**

Mewakili Indonesia dalam pertemuan yang membahas mengenai isu terkini mengenai perjuangan rakyat Palestina, dan memberikan pandangan Indonesia mengenai apa saja kontribusi yang dapat parlemen lakukan dalam mendukung perjuangan tersebut.

#### **C. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS**

Materi yang dijadikan referensi bagi delegasi yang hadir pada persidangan ini dipersiapkan dan diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP yang berupa Saran Butir Wicara.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. JALANNYA PERTEMUAN**

1. Hon. Bernd Lange membuka pertemuan dengan menjelaskan tata tertib dan tema diskusi sekaligus menjelaskan bahwa pada forum kali ini tidak hanya di ikuti oleh anggota parlemen tetapi juga di ikuti oleh para mahasiswa setempat yang bergabung secara daring. Para mahasiswa nantinya diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai tema yang akan di diskusikan. Selanjutnya Hon. Nadir Manzoor kemudian memperkenalkan secara singkat profil para pembicara dan memberikan

pengantar pembuka diskusi sesuai tema yaitu mengenai perdebatan seputar hak-hak buruh dalam perdagangan internasional.

2. Kesempatan bicara pertama diberikan kepada Ketua BKSAP DPR-RI Dr. Fadli Zon. Menurut beliau, pembicaraan apapun mengenai perjanjian perdagangan internasional sejatinya tidak boleh mengesampingkan penjaminan terhadap hak-hak buruh. Namun demikian, hal ini harus secara hati-hati di dibicarakan dan harus memperhatikan secara komprehensif segala aspek yang menyertai hak-hak buruh. Termasuk memperhatikan adanya pendapat-pendapat yang berseberangan yang menganggap bahwa keharusan bagi sebuah negara untuk meratifikasi Konvensi ILO sebagai sebuah syarat dari perjanjian dagang adalah taktik untuk melindungi pasar domestik negara maju dari produk-produk negara berkembang. Disamping itu ada juga pendapat lainnya yang menganggap bahwa tidak seharusnya isu perdagangan dan perburuhan disatukan karena keduanya membawa kepentingan yang saling berseberangan dan bahwa kewajiban untuk meratifikasi Konvensi ILO sebagai syarat perjanjian dagang tersebut merupakan sebuah upaya untuk melindungi keuntungan komparatif sumber daya manusia di negara maju.

The poster is for a Parliamentary Session on Labour Rights, part of the WTO Public Forum. It features a teal background with white and yellow text. At the top right, it states the date and time: 'Wed 29 Sept 2021 15:00–16:00 CEST' in 'ROOM CR (WTO HQ)'. The main title is 'PARLIAMENTARY SESSION IN THE CONTEXT OF THE WTO PUBLIC FORUM' with the subtitle 'Strengthen the multilateral trading system through the equitable governance of work'. Five circular portraits of participants are arranged in two rows. Below the portraits, there is a paragraph of text discussing the history of labour rights in trade agreements. To the right, there are sections for 'Moderators' and 'Panelists' with their names and affiliations. At the bottom left are the logos for the Inter-Parliamentary Union and the European Parliament. At the bottom right, there is a call to action: 'Please send an e-mail to [postbox@ipu.org](mailto:postbox@ipu.org) to confirm your participation.' with a hand icon pointing to the email address.

Wed 29 Sept 2021  
15:00–16:00 CEST  
ROOM CR (WTO HQ)

**PARLIAMENTARY SESSION**  
IN THE CONTEXT OF THE WTO PUBLIC FORUM  
Strengthen the multilateral trading system  
through the equitable governance of work

**Moderators**

- Mr. Nadir Manzoor** Co-Chair of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO, Speaker of the National Assembly of Guyana
- Mr. Bernd Lange** Co-Chair of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO, Chair of the Committee on International Trade (INTA), European Parliament

**Panelists**

- Ms. Marie-Pierre Vedrenne** Member of the European Parliament
- Dr. Fadli Zon** Member of Parliament, Indonesia
- Ms. Marva Corley-Coulibaly** Chief of the Globalization, Competitiveness and Labour Standards Unit International Labour Organization (ILO)

The question of the role of labour rights in the framework of the WTO fuelled debates in the early days of the Organization but has become far less prominent since the 1996 Singapore Ministerial Conference. In recent years, the issue of labour rights has, however, made a comeback in bilateral and plurilateral Free Trade Agreements (such as those involving the EU, for example), where the ratification of certain ILO conventions is stipulated as a requirement. At the same time, recent trade agreements such as the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) include very strong and novel provisions on labour rights.

Registration details and deadline (WTO Public Forum 2021 – Registration) by 6 September 2021

Inter-Parliamentary Union  
European Parliament

Please send an e-mail to [postbox@ipu.org](mailto:postbox@ipu.org) to confirm your participation.

Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP menjadi salah satu pembicara utama

3. Oleh karena itu, masih menurut Dr. Fadli Zon, menyikapi perbedaan pandangan yang signifikan seperti ini parlemen harus mendorong Pemerintah untuk terus mengedepankan pendekatan multilateral, termasuk memastikan WTO dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Parlemen juga dapat berperan penting dalam menyuarakan pentingnya mempertahankan peran sentral WTO sebagai lembaga utama tata kelola perdagangan internasional untuk menjaga relevansi dan menjawab tantangan yang saat ini dihadapi WTO. Termasuk penguatan sistem penyelesaian sengketa perdagangan WTO, untuk memastikan bahwa semua negara akan menuai keuntungan dari perdagangan internasional termasuk negara berkembang dan negara kurang berkembang.
4. Lebih jauh, dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai isu buruh dalam perdagangan internasional tersebut Dr. Fadli Zon berpandangan bahwa sebagai anggota parlemen, dalam menangani perbedaan pendapat ini, sebaiknya kita mengedepankan demokrasi dan pendekatan multilateral dengan tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Lebih bijaksana jika sebagai anggota parlemen, mendorong pendekatan berbasis kerjasama daripada pendekatan berbasis sanksi terkait dengan isu buruh. Pendekatan kerjasama mungkin lebih efektif dalam membantu meningkatkan praktik ketenagakerjaan di negara berkembang dan negara kurang berkembang, karena melalui pendekatan berbasis kerja sama dapat memberikan masukan dan saran yang lebih kredibel mengenai standar ketenagakerjaan yang memadai. Anggota parlemen juga perlu menyadari fakta bahwa tenaga kerja di negara maju cenderung memiliki keunggulan komparatif lebih banyak dibandingkan di negara berkembang atau negara kurang berkembang yang masih banyak tenaga kerja tidak terampil serta kondisi kerja yang tidak layak. Meskipun dipahami bahwa memperbaiki kondisi seperti itu penting, negara berkembang dan kurang berkembang mungkin juga memerlukan bantuan untuk melakukannya. Inilah sebabnya mengapa pendekatan kerjasama lebih cocok daripada pendekatan berbasis sanksi. Pada akhirnya pendekatan berbasis kerja sama diharapkan dapat membantu meningkatkan permintaan akan produk yang dihasilkan dalam kondisi tenaga kerja yang jauh lebih baik.
5. Selain menanggapi mengenai isu perburuhan yang menjadi fokus diskusi, Dr. Fadli Zon juga menyampaikan bahwa saat ini tantangan lain yang kita hadapi di masa krisis ini mungkin adalah bagaimana menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi kembali pasca pandemi dan pemenuhan agenda pembangunan berkelanjutan. Kedua hal ini sama pentingnya dan harus dicapai.
6. Menanggapi Dr. Fadli Zon narasumber dari ILO Marva Corley-Coulibaly menjelaskan bahwa pendekatan berbasis kerja sama yang disampaikan oleh Dr.

Fadli Zon menarik dan memang seharusnya pendekatan seperti ini yang lebih banyak didukung sehingga harapannya pendekatan berbasis kerja sama dapat menjadi jalan tengah dari perdebatan yang ada. Namun demikian, narasumber dari ILO juga menambahkan perlunya pendekatan tambahan yaitu pendekatan berbasis manusia atau *human-centered approach* (berbasis manusia) dalam menyikapi isu buruh dalam perdagangan internasional. Dijelaskan bahwa ILO sebagai organisasi internasional resmi yang menangani isu perburuhan diharapkan dapat memiliki peran penting dalam sistem perdagangan multilateral melalui penguatan kerja sama dan pengembangan institusional dengan organisasi lain, dalam rangka mempromosikan relasi yang kohesif antara kebijakan yang saat ini ada dengan pendekatan berbasis manusia, dengan mempertimbangkan keterkaitan yang kompleks dan krusial antara kebijakan perdagangan, keuangan, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

7. Lebih jauh, Marva Corley-Coulibaly juga menjelaskan bahwa menurut data yang dimiliki oleh pihaknya, saat ini kecenderungan yang ada adalah satu dari tiga perjanjian dagang regional menyertakan kewajiban kepatuhan pada ketentuan-ketentuan terkait ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, ILO pada prinsipnya siap untuk memberikan dukungan berupa nasihat dan keahlian teknis mengenai rancangan dan penegakan (langsung atau tidak langsung) ketentuan ketenagakerjaan, dukungan terhadap reformasi institusional dan legal, serta dukungan untuk ratifikasi Konvensi ILO yang bersifat fundamental.
8. Di akhir sambutannya, Dr. Fadli Zon juga menjelaskan bahwa untuk mempertahankan peran sentral WTO sebagai institusi utama bagi tata kelola perdagangan internasional, diperlukan reformasi untuk mendukung peran strategis WTO dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Disamping itu, Penting juga bagi parlemen untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang lebih adil, inklusif, berdasarkan aturan dan tidak diskriminatif. Negosiasi di WTO diharapkan dapat berjalan lebih seimbang dalam arti perdagangan perlu dibahas lebih luas, dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.
9. Dr. Fadli Zon juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih berkerja untuk meningkatkan *legal standing* dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja) untuk kemajuan lebih lanjut di berbagai aspek, khususnya ketentuan ketenagakerjaan.

10. Kemudian juga bahwa pada dasarnya DPR RI ingin menegaskan kembali dukungannya kepada semua anggota WTO untuk terlibat secara konstruktif guna mencapai hasil yang substantif serta menyelesaikan negosiasi yang belum selesai.

## **B. KESIMPULAN**

1. Perdebatan seputar kewajiban ratifikasi Konvensi ILO pada Perjanjian Perdagangan Internasional ini belum menemui titik terang hingga saat ini karena pihak-pihak yang berseberangan pendapat, yaitu negara maju dan negara berkembang belum mencapai titik temu yang dapat disepakati bersama.
2. Sesi pertemuan parlemen dalam konteks WTO Public Forum yang berlangsung secara daring ini dapat dikatakan cukup komprehensif dalam mendiskusikan aspek-aspek dalam perdagangan internasional yang menjadi perhatian saat ini. Namun demikian, memang terjadi beberapa kali kendala berupa gangguan jaringan dan teknis dimana poin-poin yang di sampaikan oleh narasumber Hon. Madame Marie-Pierre Vedrenne berlangsung dalam bahasa Perancis dan tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

## **C. SARAN**

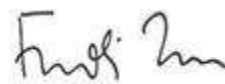
Hasil diskusi khususnya yang terkait dengan isu perdebatan seputar kewajiban ratifikasi Konvensi ILO pada Perjanjian Perdagangan Internasional perlu di komunikasikan lebih lanjut ke Komisi terkait, sehingga dapat di bahas lebih lanjut dengan mitra-mitra terkait, mengenai sejauh mana isu ini akan berdampak pada perjanjian-perjanjian dagang atau proses negosiasi di WTO yang melibatkan Indonesia.

## **III. PENUTUP**

Demikianlah pokok-pokok laporan kegiatan dalam rangka mengikuti Parliamentary Session in the Context of WTO Public forum dengan tema “Strengthen the Multilateral Trading System Through the Equitable Governance of Work” secara virtual, pada 29 September 2021. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 19 Oktober 2021

Ketua Delegasi,



**Dr. Fadli Zon**

**A-86**

---

# LAMPIRAN

---



**PARLIAMENTARY SESSION  
IN THE CONTEXT OF WTO PUBLIC FORUM**

**Strengthening Multilateral System through the Equitable Governance  
of work**

*HON. DR. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc  
Chairman of the Committee of Inter-Parliamentary Cooperation  
The House of Representatives of the Republic of Indonesia*

**INTERVENTION**

---

*Hon. Nadir Manzoor,  
Hon. Bernd Lange,  
Hon. Marie-Pierre Vedrenne,  
Hon. Marva Corley-Coulibaly,*

*Honorable Parliamentarians,  
Ladies and gentlemen,*

*Thank you for the opportunity to share views in this forum,*

The Indonesian House would like to reiterates the importance of supporting the multilateral trading system (MTS) for a fair, inclusive, non-discriminatory, transparent and stable trade and investment environment.

It is also crucial to maintain the central role of the WTO as the primary institution for global governance of international trade in order to maintain relevance and respond to the challenges currently being faced by the WTO, including the strengthening of the WTO trade dispute settlement system. Also to ensure that all countries would reap the benefits of international trade including the developing and least developed countries.

Indonesia also supports global collaboration on collective action towards a sustainable trade, and to further improve governance work in the WTO taking into consideration of various developments as well as other international commitments and consensuses.

Indonesia views that the protectionist and unilateral measures taken by several countries in the world today can be seen as an attempt to weaken the multilateral trading system and the WTO. For this reason, parliaments should encourage the Governments to continue to prioritize multilateral approach, including ensuring that the WTO can work properly according to its function.

Negotiations in the WTO are expected to run in a more balanced manner in the sense that trade needs to be discussed more broadly, by taking into account the aspects of sustainable development and the interests of developing countries and least developed countries.

Indonesia also actively participates in various pending negotiations at the WTO and seeks to reach an agreement in order to strengthen the multilateral trading system. We are also open to various developments relating and influencing international trade with a view to have a common shared goal for global economic development.

Regarding to the issue of labor rights, as parliaments we should encourage a more balanced perspective where developed countries should also pay attention to the interests of developing and less developed countries.

We are aware that there are two different opinions in this matter. There are countries in favor of inserting social clauses in the international trade agreement as an effort to improve labor rights, but there are also perspective that see the social clauses as hidden protectionism that may set aside the results of expanding market access that have been hardly earned through the Uruguay round. Thus, it will not be effective as free trade and labor rights are seen as two opposing interests.

Against this debate, in my opinion, while it is important to make sure that every international trade talks should not disregard the rights of labors, we also have to be more prudent in discussing this matter and consider all aspects comprehensively.

As parliamentarians, in handling these differing opinions, it is best that we put forward democracy and multilateral approach with a view to achieve common shared economic goals.

Perhaps it is wiser that we as parliamentarians encourage cooperation approach rather than the sanctions-based approach. Cooperation approach may be more effective at helping to improve labor practices in developing countries and less developed countries as they may provide a more credible advice regarding adequate labor standards.

We may also need to see the fact that in comparison, labors in developed countries tend to have more comparative advantages than in developing countries or less developed countries where there are still many unskilled labors as well as improper working conditions. While it is understood that improving such conditions is important, developing and less developed countries may also need assistance in doing so. This is why a cooperation approach is more suitable than sanctions-based approach.

In the end the cooperation approach would hopefully helping to increase demand for products produced in a much more improved labor conditions.

At the national level Indonesia continues its works to improve its legal environment through the establishment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation to further progress on various aspects, particularly on labor provisions. The law is also aimed to enhance Indonesia's capacity to be able to adapt with various global developments, as well as to foster job creation and ease of doing business.

***Honorable Parliamentarians,  
Ladies and gentlemen,***

Another challenge that we are facing in this critical time is probably on how to strike a balance between pushing the economic growth back post the pandemic and the fulfillment of the sustainable development agenda. These two things are equally important and must be achieved.

To that end, the Indonesian House is of the view that it is important that we as parliaments encourage strong political engagement, flexibility, and pragmatism in the 12<sup>th</sup> Ministerial Conference in order to reach substantive outcomes and reaching conclusions on negotiations by accommodating the best interests of all members particularly the developing countries and least developed countries.

The success of the Ministerial Conference would send a bold message to the world to maintain and strengthen the Multilateral Trade System. In order to that, it is imperative that members show strong political engagement, flexibility, and pragmatism. That should take into account the centrality of development issues and the developmental needs of developing countries and Least Developed Countries.

***Thank you***

## Bahan Masukan

### Pertemuan

#### *Parliamentary Session on the Occasion of the WTO Public Forum*

#### ***"Strengthen the multilateral trading system through the equitable governance of work"***

Jenewa, 29 September 2021

#### **Latar Belakang**

1. Perdagangan merupakan salah satu sektor penting bagi setiap negara, dimana perdagangan merupakan katalis penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Aktivitas perdagangan dapat menciptakan adanya lapangan pekerjaan, inovasi, dan kesejahteraan. Lebih lanjut, adanya perdagangan global juga mendorong terjadinya investasi yang dapat menunjang perkembangan ekonomi.
2. Guna menjaga agar perdagangan internasional berjalan dengan lancar, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sistem perdagangan multilateral (*multilateral trading system/MTS*) yang terbuka, memiliki aturan yang jelas, tidak diskriminatif, dan seimbang dapat mengakomodasi kepentingan semua anggota, khususnya kebutuhan pembangunan negara berkembang dan *least developed countries* (LDCs).
3. WTO sebagai organisasi yang berdasarkan aturan Multilateral yang menyediakan lingkungan yang terbuka, aman, transparan, adil dan dapat diprediksi agar aktivitas dan kegiatan perdagangan global dapat berjalan dengan lancar. Berbagai ketentuan yang dihasilkan oleh GATT sejak tahun 1948 hingga tahun 1994 menjadi dasar pijakan untuk pertumbuhan ekonomi global serta peningkatan hubungan perdagangan antar negara.
4. Selanjutnya, perjalanan panjang WTO sejak tahun 1995 (lebih dari 25 tahun) sebagai 'pengampu' Sistem Perdagangan Multilateral saat ini juga dinilai telah berhasil menjadikan perdagangan internasional sebagai salah satu pengungkit yang efektif dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan global. Dengan nilai perdagangan yang hampir empat kali lipat dibandingkan dengan pada awal pembentukannya, hambatan tarif telah turun secara signifikan hingga 50%.
5. Hal ini tentunya dikarenakan kepercayaan serta dukungan yang diberikan oleh 164 negara anggota WTO terhadap pelaksanaan Sistem Perdagangan Multilateral yang efektif, yaitu: non-diskriminatif, *rules-based*, dan transparan. Dengan perekonomian global yang semakin dinamis, kinerja perekonomian dan perdagangan internasional yang relatif stabil dan *predictable* dalam beberapa dekade terakhir merupakan pencapaian yang tidak mudah.
6. Dalam dua dekade terakhir, gelombang globalisasi telah menyebabkan munculnya berbagai tren baru dalam perdagangan internasional. Internasionalisasi *supply-chain*, meningkatnya *off-shoring*, maraknya *global value chain* hingga digitalisasi dan otomatisasi merupakan contoh perubahan yang secara masif dan cepat terjadi dalam perdagangan internasional saat ini.
7. Hal ini menyebabkan isu-isu seperti seperti perdagangan jasa, *government procurement*, fasilitasi perdagangan (isu-isu bea dan cukai), investasi dan persaingan usaha hingga perdagangan elektronik menjadi sangat krusial. Untuk menjawab tantangan tersebut,

anggota-anggota WTO berinisiatif untuk mendiskusikannya dalam format 'plurilateral' seperti dalam isu *government procurement* dan ITA maupun *joint statement initiatives*.

8. Hal ini dirasakan manfaatnya untuk memberikan kesempatan bagi para anggota WTO yang tertarik untuk mendiskusikan hal-hal penting yang berkembang secara global. Di satu sisi, hal ini tentunya berdampak positif terhadap WTO untuk terus beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Namun di sisi lain, tidak terhindarkan adanya dampak negatif terhadap sistem perdagangan multilateral itu sendiri (MTS).

### **Perkembangan Terkini**

9. Berbagai dinamika perkembangan yang terjadi di WTO tidak terlepas dari perubahan tren prekonomian global serta perkembangan tensi geopolitik di dunia. Turunnya hambatan perdagangan dan peningkatan laju globalisasi menciptakan pola proses produksi baru yaitu *production sharing* yang bertumpu pada rantai nilai global atau *global value chain* (GVC), sehingga barang hasil produksi merupakan output yang berasal dari banyak negara sehingga arus perpindahan tidak hanya terkait dengan arus barang tapi juga terkait dengan pengetahuan, jasa, modal dan tenaga kerja.
10. Tren GVC ini menempatkan peranan negara berkembang menjadi sangat strategis karena merupakan tujuan investasi utama dari para investor global. Oleh sebab itu, tren ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan ekonomi antar negara khususnya antara negara maju dan berkembang, yang dilatarbelakangi oleh perubahan terhadap peta perekonomian global yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
11. Penurunan PDB dari negara-negara maju pada gilirannya berdampak pada penurunan porsi dalam sektor industri manufaktur secara global. Tren GVC yang berkontribusi terhadap perubahan struktur ini justru beralih kepada peningkatan porsi industri manufaktur yang cukup signifikan bagi negara berkembang, khususnya Tiongkok dan enam negara lainnya (termasuk Indonesia).
12. Hal ini mencerminkan kepentingan negara-negara maju untuk dapat mendorong negara-negara berkembang untuk berkomitmen lebih terhadap reformasi ekonomi yang mencakup transparansi kebijakan perdagangan dan industri, perlakuan non-diskriminatif terhadap perusahaan asing, hingga perlindungan kekayaan intelektual.

### **Posisi Indonesia**

13. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia berkepentingan terhadap keberlanjutan sistem perdagangan multilateral (MTS) yang terbuka, *rules based*, dan *equitable* sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur melalui upaya untuk terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing dalam perdagangan internasional.
14. Dalam rangka menghadapi berbagai perkembangan, perubahan, serta memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia terus berusaha ikut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara, terutama untuk mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan tertib serta bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perkembangan perdagangan internasional tersebut.

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus beradaptasi untuk sejalan dengan berbagai perkembangan global yang ada, yang tujuan untuk:
  - **Mendorong penciptaan dan pembukaan lapangan kerja;**
  - Memudahkan pembukaan usaha baru; dan
  - Mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
16. Indonesia memandang bahwa langkah-langkah proteksionis dan unilateral yang dilakukan beberapa negara di dunia dewasa ini dapat dipandang sebagai upaya pelemahan sistem perdagangan multilateral, cq. WTO. Untuk itu, Pemri perlu terus **mengedepankan pendekatan multilateral**, termasuk memastikan agar WTO dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
17. Indonesia juga secara aktif ikut berkontribusi dalam berbagai negosiasi di WTO guna mencapai kesepakatan dalam rangka memperkuat sistem perdagangan multilateral, termasuk dalam proses perundingan yang dilakukan secara plurilateral di bawah kerangka WTO, serta terus mengamati secara dekat perkembangan perundingan plurilateral lainnya.

### **Suggested Talking Points**

18. *Indonesia reiterates the importance of supporting the multilateral trading system (MTS) for a fair, inclusive, non-discriminatory, transparent, predictable, and stable trade and investment environment.*
19. *It is also crucial to maintaining the central role of the WTO as the primary institution for global governance of international trade*
  - *to ensure that all countries reap the benefits of international trade.*
20. *Trade is a catalyst for development:*
  - *through the opening of market access for products, greater efficiency through economic resource allocation, and productivity.*
  - *to attract investment and to boost economic and social development*
  - *supports the improvement of welfare through access to a wider range of high-quality, affordable inputs, as well as access to technology and know-how*
21. *Indonesia is open to various developments relating and influencing international trade*
  - *with a view to have a common shared goal for global economic development.*
22. *Indonesia also supports global collaboration on collective action towards a sustainable trade, and to further improve governance work in the WTO*
  - *taking into consideration of various developments as well as other international commitments and consensuses .*
23. *at the national stage, Indonesia continues its works to improve its legal environment through the establishment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation*
  - *to further progress on various aspects, particularly on labour provisions.*
24. *Indonesia would like to reiterate its commitment to engage in a constructive manner with other WTO members in order to reach substantive outcomes in the Twelfth WTO Ministerial Conference in Geneva.*
  - *The success of the Ministerial Conference would send a bold message to the world to maintain and strengthen the MTS.*

25. *In order to that, it is imperative that members show strong political engagement, flexibility, and pragmatism.*

- *That should take into account the centrality of development issues and the developmental needs of developing countries and LDCs.*

**=00=**

**17 September 2021  
Kementerian Luar Negeri**